



Radar Bali

Gerogoti APBD, Trans Sarbagita Dievaluasi

DENPASAR - Eksistensi moda transportasi masal Trans Sarbagita terus digoyang DPRD Bali. Dewan menilai bus Trans Sarbagita tidak efektif dan terus menggerogoti APBD Provinsi Bali. Setiap tahun dana Rp 18 miliar digelontorkan untuk operasional bus Trans Sarbagita. Tapi, sampai saat ini bus bantuan pemerintah pusat itu tidak dilirik masyarakat.

Tarif murah tapi tidak diimbangi dengan jaminan tepat waktu membuat masyarakat ogah menggunakan jasa Trans Sarbagita. Anggaran besar yang selama ini diberikan pun dianggap mubazir. Komisi I DPRD Bali tegas meminta eksekutif melakukan evaluasi. Pantauan koran ini kemarin (11/4) bus rute Tabanan - Denpasar - Bandara, sepi penumpang. "Saya lihat sendiri, yang diangkut bus Sarbagita itu bukan orang. Tapi, yang diangkut *wong samar*. Kenapa *wong samar*? Busnya kosong cuma ada sopir sama kernet saja," sentil Ketua Komisi I, Ketut Tama Tenaya. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, anggaran Rp 18 miliar untuk Trans Sarbagita



KURANG DIMINATI: Moda transportasi masal Trans Sarbagita yang dibesut Pemprov Bali untuk mengurangi kemacetan agaknya belum berhasil memikat masyarakat.

bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Seperti membantu bidang pendidikan dan kesehatan yang saat ini tengah keteteran akibat Pemprov mengalami defisit anggaran. "Sangat disayangkan bila uang Rp 18 miliar dibuang pertahun. Kan bisa digunakan untuk keperluan lain. Kami minta segera dievaluasi," desak Tenaya.

Menanggapi usulan dewan, Gubernur Pastika menyatakan setuju Trans Sarbagita harus dievaluasi. Terutama operasional bus ukuran besar. Pemerintah sendiri tampak bingung memelihara fisik bus. Menurut Pastika, piranti dan onderdil bus banyak menggunakan buatan luar. Pemerintah juga tidak mungkin

mengembalikan bus ke pemerintah pusat. Pun kemungkinan disewakan pada pihak ketiga belum dikaji. "Atau ada anggota dewan yang mau beli busnya dipakai rumah makan. Evaluasi Sarbagita minggu ini," ujar Pastika. Sayangnya, Pastika tidak menjelaskan evaluasi seperti apa yang akan dilakukan. **(san/rid)**

Edisi : Rabu, 12 April 2017

Hal : 24



Geram, Kejati Layangkan Surat ke Polda

Pertanyakan Tindakan Pasca Turunnya SPDP

DENPASAR-Belum adanya perkembangan pasca menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali, membuat pihak Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Bali geram. Bahkan, sebagai upaya tindak lanjut dari proses penyidikan kasus dugaan jual beli ijin Kondotel di Kuta Selatan, yang menyeret Ketua DPRD Badung I Made Parwata, itu tim penyidik dari korp Adiyaksa Bali ini tegas melayangkan surat ke Polda Bali.

Kepala Seksi (Kasi) Penuntutan Kejati Bali Wayan Suardi saat dikonfirmasi, Selasa (11/4), menegaskan pihaknya akan berkirim surat ke penyidik Polda Bali. "Kami tengah mengkonsep surat untuk dikirim ke Polda Bali. Isi dari surat itu, yakni mempertanyakan kelanjutan SPDP yang sudah dikirim," jelasnya.

Pun saat ditanya kapan pihak kejaksaan akan melayangkan surat ke penyidik Polda Bali. Ditanya begitu, Suardi menyatakan, surat akan dikirim dalam waktu dekat ini. "Rencananya surat akan dilayang dalam waktu dua hari lagi (Kamis 13/4)," ungkapnya.

Perkembangan sebelumnya, tim penyidik Kejati Bali yang menangani perkara ini tengah menunggu berkas kasus yang diduga melibatkan Ketua DPRD Badung I Made Parwata, dari penyidik Polda Bali. Selain menunggu berkas, penyidik Kejati Bali juga menunggu proses gelar perkara atau ekspose yang dilakukan penyidik Polda Bali. Sementara ini baru menunggu ekspose dari penyidik di kepolisian.

Sedangkan upaya kami selain terus mendorong dengan koordinasi sesuai berita acara,

kami juga fokuskan pada penguatan keterangan ahli untuk pembuktiannya," ujar Suardi. Dijelaskan, Kejati Bali terus melakukan koordinasi secara intens dengan penyidik Polda Bali. Tujuannya agar proses penyidikan segera rampung.

"SPDP umum sudah kami terima, akan tetapi sampai saat ini kami masih menunggu berkas. Kami terus berupaya dengan berkoordinasi dengan penyidik di kepolisian," ujarnya.

Suardi berharap proses atau tahapan penyidikan dipercepat. "Kita berharap pengusutan kasus ini segera rampung," tegasnya.

Pihaknya menyatakan, dengan dikirimnya SPDP oleh penyidik kepolisian, Suardi mengaku optimis bahwa dalam kasus ini akan ada tersangka karena dengan dikirimnya SPDP, maka sudah ada minimal dua alat bukti. Selain itu, pengiriman SPDP juga diperkuat dengan keterangan saksi, ahli dan alat bukti lain termasuk keterangan dari pihak tersangka. "Ya kita lihat saja nanti," ujarnya singkat.

N a m u n , penyidik masih memerlukan alat bukti yang kuat agar saat menetapkan tersangka tidak blunder. Biasanya lemahnya alat bukti bisa dijadikan senjata dalam mengajukan gugatan praperadilan.

Menurut Suardi, kasus ini sejatinya merupakan kasus biasa saja. Ke-



Tidak ada itu istilah orang kuat yang kebal hukum. Semua sama saja di mata hukum. Kalau terbukti bersalah, ya harus dihukum."

Wayan Suardi, Kasi Penuntutan Kejati Bali

jati tidak memberi atensi khusus pada kasus ini. Namun, saat disinggung, kasus ini diduga melibatkan orang kuat. Suardi dengan tegas menyatakan, siapapun orang yang terlibat kedudukannya sama di mata hukum. "Tidak ada itu istilah orang kuat yang kebal hukum. Semua sama saja di mata hukum. Kalau terbukti bersalah, ya harus dihukum," tegas Suardi.

Seperti diketahui, kasus ini terjadi sekitar tahun 2014 lalu. Saat itu ada satu perusahaan properti yang akan membangun kondotel di wilayah Kuta Selatan, Badung,

Informasi dari sumber yang enggan namanya disebutkan menyatakan, untuk mengurus ijin Direktur perusahaan berinisial CR lalu bertemu dengan Parwata yang saat itu masih menjadi anggota DPRD Badung.

Dalam pertemuan tersebut, membahas keinginan perusahaan yang berencana mencari ijin prinsip untuk pembangunan kondotel. Dikatakan sumber, Parwata sendiri menyatakan kesiapannya membantu. "Saat itu Parwata menjanjikan akan membantu mencari ijin prinsip yang diperlukan," ungkap sumber.

Dalam pengurusan ijin, sumber menjelaskan, pihak perusahaan melalui CR ditengarai memberikan uang kepada Parwata untuk mengurus ijin. Total uang yang diberikan untuk mengurus ijin prinsip tersebut mencapai Rp 3,3 miliar. "Diawal sempat minta Rp 1 miliar. Lalu saat pengurusan hingga selesai sempat minta uang beberapa kali hingga total Rp 3,3 miliar," bebarnya.

Ijin prinsip yang dijanjikan

akhirnya selesai. Namun masalah muncul pada akhir 2016 lalu, setelah ada surat kaleng yang masuk ke meja Dit Reskrimsus yang mengungkap adanya jual beli ijin tersebut. Beberapa pejabat perusahaan properti ini lalu dipanggil penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali untuk dimintai keterangan terkait dugaan jual beli ijin yang diduga dilakukan oleh Parwata.

Pemeriksaan juga dilakukan penyidik terhadap mantan direktur berinisial CR. "Jadi pihak perusahaan ini tidak tahu masalah dan tiba-tiba diperiksa. Termasuk CR yang kini berada di Lapas Kerobokan karena kena kasus penipuan cek kosong," terangnya.

Dikatakan sumber, pemeriksaan yang dilakukan penyidik, beberapa pejabat perusahaan mengakui adanya aliran dana hingga Rp 3,3 miliar kepada Parwata untuk pengurusan ijin prinsip. Uang Rp 3,3 miliar yang diserahkan CR kepada Parwata inilah dipermasalahkan. "Parwata diduga menyalahi wewenang," pungkas sumber. (pra/dot)

Edisi : Rabu, 12 April 2017

Hal : 24



Rekanan KBS Kembalikan Kerugian

Nilai Kontrak Rp 5,5 Miliar Lebih

MANGUPURA- Sejak dari awal proses pembuatan Kartu Krama Badung Sehat (KBS) terus mengalami masalah. Mulai dari pekemanan hingga pencetakan kartu bermasalah. Bahkan pihak rekanan pembuatan Kartu KBS yakni CV. Sembe Dewata mengembalikan kerugian.

Informasi yang dihimpun koran ini sebelumnya pencetakan kartu KBS oleh CV. Sembe Dewata dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.591.261.148 bermasalah. Rekanan melakukan perekaman tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Untuk mencetak kartu mereka menggunakan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil semester 1 Tahun 2016, atau hanya berdasarkan NIK dan No. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Sehingga kartu yang tercetak kan LHP. "Ya, inspektorat telah selesai melakukan pemeriksaan, dan rekanan (CV. Sembe Dewata) telah mengembalikan kerugian sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat," jelas Putra Suteja dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Putra Suteja menegaskan, rekanan telah mengembalikan sejumlah Rp 310.050.540 ke kas daerah. Pun begitu mengenai 28.341 kartu yang bermasalah Putra Suteja menerangkan akan dilakukan pencetakan ulang. Hanya saja baru dianggarkan pada perubahan tahun 2017 ini. Untuk warga Badung yang belum atau kartu KBS-nya bermasalah cukup menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program KBS. "Cukup menggunakan KTP untuk warga yang belum memiliki kartu KBS. Sedangkan pencetakan kartu akan dilaksanakan pada anggaran perubahan ini," jelas pejabat asal Mengwitani ini.

banyak bermasalah, misalkan banyak alamat yang tercetak di lapangan, bahkan warga sudah meninggal atau pindah domisili tetap mendapatkan kartu. Selain itu dalam rapat evaluasi Dinas Kesehatan (Diskes) Badung yang dilaporkan ke Wakil Bupati (Wabup) ditemukan kartu bermasalah sebanyak 25.642, namun bocoran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Badung kartu yang bermasalah membengkak menjadi 28.341, atau ada tambahan 2.669 kartu bermasalah.

Rekanan CV. Sembe Dewata wajib mengembalikan kerugian ke kas daerah sebanyak Rp 310.050.540. Sayangnya ketika Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Luh Putu Suryaniti belum bisa dikonfirmasi mengenai hasil LHP mengenai kartu KBS. Beberapa kali dihubungi, mantan Mengwi ini selalu mengaku sedangrapat, demikian pula pesan singkat yang dikirim tidak

mendapatkan balasan.

Kabag Humas Setda Badung I Nyoman Sujendra juga membenarkan hal ini. Kabupaten Badung dirugikan Rp 310 juta lebih. "Memang daerah dirugikan sekitar 310.050.540. Tapi yang jelas sudah dikembalikan oleh pihak ketiga dan ada surat setoran kepada kas daerah," jelas ditemui Selasa (11/4) di Puspem Badung.

Pengembalian uang tersebut dikatakan sebagai konsekuensi karena sebanyak 28.341 kartu yang dianggap bermasalah, seperti ada yang sudah meninggal dan indah domisili tapi mendapat kartu, sedangkan yang sudah melakukan perekaman ternyata belum mendapat kartu. "Per kartu kan harganya Rp 10.940. Jadi jika dikalikan dengan 28.341 jumlah kartu bermasalah, maka hasilnya Rp 310.050.540," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Badung I Gede Putra Suteja membenarkan Inspektorat telah mengeluarkan

"Memang daerah dirugikan sekitar 310.050.540. Tapi yang jelas sudah dikembalikan oleh pihak ketiga dan ada surat setoran kepada kas daerah."

I NYOMAN SUJENDRA

Kabag Humas Setda Badung

Begitu juga Dirut RSUD Mangusada Badung dr. I Nyoman Gunarta secara terpisah mengatakan, seluruh warga Badung baik yang telah memiliki kartu KBS maupun dengan menunjukkan KTP, tetap mendapat pelayanan dengan baik. "Walau hanya menunjukkan KTP, seluruh warga Badung kita layani. Ini sesuai dengan komitmen Bapak Bupati agar seluruh warga Badung terlayani dengan baik melalui program KBS," pungkasnya. (dwi/rid)

Edisi : Rabu, 12 April 2017

Hal : 27